

**BATASAN HAK IMUNITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
DALAM MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN**

IKRAM A. ABUBAKAR

NPM : 231020518041

**Tesis ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum**



**UNIVERSITAS NASIONAL
MAGISTER HUKUM
JAKARTA 2025**

**LIMITATIONS ON THE HOUSE OF REPRESENTATIVES' (DPR)
IMMUNITY RIGHTS IN IMPROVING ITS OVERSIGHT FUNCTION**

IKRAM A. ABUBAKAR

NPM : 231020518041

**This thesis is submitted as one of the requirements for the
Master of Laws degree**



NASIONAL UNIVERSITY

MASTER OF LAWS

JAKARTA 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama :Ikram A. Abubakar

NPM :231020518041

Judul Tesis :**BATASAN HAK IMUNITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR) DALAM MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN**

Tesis ini telah di setujui untuk dipertahankan dalam Ujian Sidang Tesis dihadapan
Tim Penguji Program Studi Magister Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, Agustus 2025

Ketua Program Studi :Dr.Drs.Tb.Mochamad Ali Asgar,S.H.,M.H.,M.Si.,M.M

Tanda tangan

Pembimbing Tesis :Dr. MUSTAKIM, SH, MH, CMC., CCD.

Tanda Tangan

LEMBAR PENGESAHAN

BATASAN HAK IMUNITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM
MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN

IKRAM A. ABUBAKAR

231020518041

Tesis ini Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Program Studi Magister
Hukum Tanggal 01 September 2025.

DEWAN PENGUJI		Tanggal
	Tanda tangan	
Dr. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M., (Ketua Penguji)		9/9.25
Masidin, SH., MH. (Sekretaris Prodi/Sekretaris Sidang)		9/9.2025
Dr. Hamrin, SH., Msi (Han), M.H. (Penguji)		9/9.2025
Dr. Mustakim, SH, MH, CMC., CCD. (Pembimbing/Penguji)		9/9.2025

Jakarta, 01 September 2025

Ketua Program Studi



Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS

BATASAN HAK IMUNITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM
MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN

IKRAM A. ABUBAKAR

231020518041

Tesis ini telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari tim penguji dalam sidang
ujian tesis pada tanggal 01 September 2025 sebagaimana tertulis dalam berita
acara ujian tesis

Dr. Tb. Mochamad Ali Asgar,
S.H., M.H., M.Si., M.M.,

(Ketua Penguji)

Masidin, SH., MH.

(Sekretaris Prodi/Sekretaris Sidang)

Dr. Hamrin, SH., Msi (Han), M.H.

(Penguji)

Dr. Mustakim, SH, MH, CMC., CCD.

(Pembimbing/Penguji)

Tanda tangan

Tanggal

9/9/25

9/9.2025

9/9.2025

9/9.2025

Jakarta, 01 September 2025

Ketua Program Studi



Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IKRAM A. ABUBAKAR
Tempat/Tanggal Lahir : TIDORE 09 APRIL 2001
Nomor Pokok Mahasiswa : 231020518041
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : HUKUM
Universitas : UNIVERSITAS NASIONAL
Alamat : Jl. Raya Tabanalou

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan di buat oleh peneliti sendiri dan untuk diajukan agar memperoleh gelar akademik Magister, yang terdapat di Universitas Nasional.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, dengan arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis yang jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini

Jakarta, Agustus 2025

Yang Membuat



Ikram A. Abubakar

NPM 231020518041



ABSTRAK

Universitas Nasional

Pasca Sarjana Program Magister Hukum

TESIS, Agustus, 2025

Nama Penulis :Ikram A. Abubakar

NPM :231020518041

Judul Tesis :**BATASAN HAK IMUNITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN**

Isi Abstrak :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Namun, ketentuan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan, karena tidak seluruh tindakan anggota DPR dalam berbagai konteks dijelaskan batasannya secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan normatif hak imunitas DPR serta implikasinya terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, termasuk dokumen legislatif dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi titik-titik rawan penyimpangan dari hak imunitas yang dijadikan tameng dalam menghadapi proses hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak imunitas DPR bersifat konstitusional, pembatasannya dalam Pasal 224 dan Pasal 245 UU MD3 belum sepenuhnya efektif menahan laju penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktiknya, imunitas kerap dimaknai secara luas oleh sebagian anggota DPR untuk menghindari proses hukum, meskipun tindakannya berada di luar pelaksanaan tugas dan wewenang. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung kesetaraan semua warga negara di depan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi norma dan penguatan mekanisme pengawasan internal lembaga legislatif agar hak imunitas tidak menimbulkan ketimpangan dalam sistem peradilan.

Jumlah Referensi Buku:30, Jurnal:28, Peraturan Perundang-undangan:4, Putusan Pengadilan:4, Tesis:3, Artikel dari internet:10, Kamus:1

Nama Pembimbing: Dr. Mustakim, SH, MH,CMC,CCD

ABSTRACT

National University

Postgraduate Program Master of Laws

THESIS, Agustus, 2025

Name :Ikram A. Abubakar

NPM :231020518041

Thesis Title : *LIMITATIONS ON THE IMMUNITY RIGHTS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES (DPR) IN IMPROVING ITS SUPERVISORY FUNCTION*

Abstract Contents

Law Number 2 of 2018 concerning the Second Amendment to Law Number 17 of 2014 on the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representative Council, and the Regional House of Representatives (MD3 Law) regulates parliamentary immunity for members of the House of Representatives (DPR) as a form of legal protection in the exercise of their constitutional functions. However, this provision raises concerns about potential abuse of power, as it does not explicitly define the boundaries of protected actions in all contexts. This research aims to analyze the normative limits of parliamentary immunity and its implications for the principle of equality before the law. The research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. Data sources consist of primary and secondary legal materials, including legislative documents and court decisions. The analysis is conducted qualitatively to identify the critical points where the right to immunity can be misused to evade legal accountability. The findings show that although parliamentary immunity is constitutionally guaranteed, the limitations set out in Articles 224 and 245 of the MD3 Law are not entirely effective in preventing abuse. In practice, some DPR members interpret this right broadly to avoid legal processes, even when their actions fall outside their legislative duties. This contradicts the principle of a rule-of-law state that upholds equality of all citizens before the law. Therefore, reformulation of the legal provisions and reinforcement of internal oversight mechanisms within the legislature are necessary to prevent immunity from becoming a tool of legal inequality.

Number of Book References: 30, Journals: 28, Legislation: 4, Court Decisions: 4, Theses: 3, Articles from the internet: 10, Dictionary: 1

Mentor Name: Dr. Mustakim, SH, MH, CMC, CCD

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berkat limpahan rahmat serta petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **BATASAN HAK IMUNITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN** Ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Nasional. Selain itu, tesis ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Magiste Hukum Universitas Nasional.

Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik berkat limpahan rahmat dan bimbingan dari Allah SWT, serta dukungan dari berbagai pihak yang turut berperan. Untuk itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, di antaranya:

1. Yang amat sangat terpelajar bapak Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera M.A., selaku Rektor Universitas Nasional Jakarta yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional.
2. Yang amat sangat terpelajar bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Yang amat sangat terpelajar bapak Dr. Mustakim, SH, MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Yang amat sangat terpelajar bapak Dr. Drs.H. Tb. Moch. Ali Asgar, SH., MH., M.Si.. MM. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Nasional sekaligus dosen penguji yang telah melakukan pengujian pada tanggal 1 September 2025.
5. Yang amat sangat terpelajar bapak Masidin SH, MH. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Universitas Nasional sekaligus dosen penguji yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2025.

6. Yang amat sangat terpelajar bapak Dr, Mustakim, SH,MH,CM, sebagai dosen pembimbing yang luar biasa dalam menyediakan perhatian, waktu dan tenaga dalam semua kegiatan pengarahan dan bimbingan dan secara khusus sangat memotivasi belajar dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Dan sekaligus penguji pada tanggal 1 September 2025.
7. Yang amat sangat terpelajar bapak Dr. Hamrin, SH., Msi (Han), M.H selaku penguji yang dilaksanakan pada 1 September 2025.
8. Yang amat sangat terpelajar para Dosen Magister Hukum Universitas Nasional yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu terima kasi atas ilmu yang diberikan selama Penulis menempuh perkuliahan.
9. Sekretariat Magister Hukum Universitas Nasional.
10. Orang tua, Adik Perempuan ku tercinta dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan doa dan motivasi untuk menyelesaikan tesis.
11. Teman-teman seperjuangan yang ada di Maluku utara yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
12. Teman-teman perkuliahan penulis pada Program Magister Hukum Universitas Nasional yang selalu kompak selama proses menempuh pendidikan.
13. Untuk teman saya Aldi Umasohi S.H terima kasih karna selalu memberikan suport dalam menyelesaikan Tesis ini
14. Untuk teman saya Marwan S.H sekaligus teman diskusi yang tidak pernah bosan untuk mensuport saya demi terciptanya tesis yang berkualitas

Saya sepenuhnya menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih memiliki sejumlah keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis terbuka terhadap berbagai masukan, baik berupa kritik maupun saran yang bersifat membangun, demi penyempurnaan karya pada kesempatan berikutnya. Harapan penulis, segala bantuan dan dukungan yang diberikan memperoleh balasan yang setimpal dari Allah SWT, serta semoga hasil penelitian ini dapat memberikan nilai guna, baik bagi pribadi penulis maupun pihak lain yang membutuhkan.

Jakarta, Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
JUDUL BAHASA INGGRIS.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Desain Penelitian	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Bahan Hukum	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Metode Analisis Bahan Hukum	16
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	19
A. Kerangka Teoritis.....	19
1. Tinjauan umum Negara Hukum.....	19
2. Tinjauan Umum Pemisahan Kekuasaan.....	27
3. Tinjauan Umum Kewenangan	31
B. Kerangka Konseptual.....	35

1. Tinjauan Umum Hak Imunitas.....	35
2. Tinjauan Umum Lembaga Negara	40
3. Tinjauan Umum <i>Equality Before The law</i>	45
 BAB III BATASAN HAK IMUNITAS DPR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANYA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA	53
A. Fungsi Dan Kewenangan DPR	53
B. Hak Dan Kewajiban DPR	59
C. Batasan Hak Imunitas DPR	64
D. Implikasi Batasan Hak Imunitas DPR terhadap Prinsip <i>Equality Before The Law</i>	68
 BAB IV PENERAPAN HAK IMUNITAS YANG DIMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)	73
A. Penerapan Hak Imunitas Dalam Praktik Hukum Dan Politik.....	73
B. Kriteria Hak Imunitas DPR Dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan.....	84
 BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
 DAFTAR PUSTAKA	

